



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang melalui Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengelola Website Biro Perekonomian Setda Prov Nusa Tenggara Barat.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Mataram, 15 Mei 2021

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda prov NTB





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Bagian I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	4
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	6
Bagian III : Layanan Informasi Publik	8
Bagian IV : Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	9
Bagian V : Kendala Eksternal dan Internal	10
Bagian VI : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	10



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi.....	5
Tabel 2.1.1. Sarana dan Prasarana PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB.....	6
Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB.....	7
Tabel 2.3.1. Jumlah Anggaran PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB T.A. 2017.....	7
Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP	8
Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	9

Bagian I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada awal tahun 2021 Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Surat Keputusan 1.a Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah Biro Perekonomian Setda Prov Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku atasan PPID Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

REGULASI

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	2018
	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	2010
	PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010	STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK	2010
	PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013	PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	2013
	PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017	PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK	2017
	PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH	2015

ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2020, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP.
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik.
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID.
4. Melakukan *update* Informasi Publik.

Hingga akhir tahun 2020, sebagian besar fokus kerja yang telah dirancang telah dicapai, seperti melakukan *update* Informasi Publik terutama pada Website PPID Provinsi NTB, mendokumentasikan DIP, melaksanakan SOP PPID.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

SARANA DAN PRASARANA

Tabel 2.1.1. Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Printer (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Telepon + fax (1 set) - Televisi (1 buah) - Lemari Arsip (1 buah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemari Arsip (2 buah)
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	<ul style="list-style-type: none"> - PC (1 buah) - AC (2 buah) - Meja Rapat (6 buah) - Meja Kerja (2 buah) - Printer (1 buah) - Lemari Arsip (1 buah) - UPS (2 buah) - Laptop (1 buah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop (3 buah) - Whiteboard rapat (1 buah) - Whiteboard agenda - Dispenser (1 buah) - LCD Proyektor (1 buah) - Kursi rapat (20 buah)
3	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Website</i> PPID - Banner (2 buah) 	

Pada tahun 2020, untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Biro Perekonomian Setda Prov NTB Lantai 3 yang berlokasi di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram.

SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Provinsi NTB ditunjuk oleh Kepala Biro melalui Surat Keputusan Kepala Biro Perekonomian NTB 02 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengelola Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Adapun Pengelola Website pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB antara lain :

Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	Personil Pengelola Website	1. Pengelola Website	<ul style="list-style-type: none"> - Atasan PPID - Ketua PPID - Koordinator Bidang Pengelola Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Anggota - Anggota - Anggota - Koordinator Bidang Pelayanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Anggota - Anggota - Anggota - Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Anggota - Anggota - Anggota

INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui *Website* PPID Biro Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (<https://biroekonomi.ntbprov.go.id/>).

BESARAN ANGGARAN :

Tabel 2.3.1. Jumlah Anggaran Pengelola Website Provinsi NTB T.A. 2020

NO.	SUMBER DANA PPID TAHUN 2020	BESAR ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TERPAKAI (Rp.)
1.	APBD	4.800.000	4.800.000

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Biro Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIP-PPID) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung *Website* PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun Meja Layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP

Bulan	Jumlah Kunjungan (Pengunjung)	Jumlah Download DIP (Kali)
Januari	100	0
Februari	140	0
Maret	175	0
April	150	0
Mei	125	0
Juni	0	0
Juli	50	0
Agustus	215	0
September	180	0
Oktober	135	0
November	218	0
Desember	160	0
Total	110	0

Bagian IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2020, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bagian V

KENDALA INTERNAL EKSTERNAL

KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Operator Sistem Informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-*update* daftar informasi publik OPD-nya pada Website PPID Provinsi NTB.

KENDALA EKSTERNAL

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat.

Bagian VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut Tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Biro Perekonomian Provinsi NTB dapat lebih maksimal kedepannya.

